



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADI DARMA**
2. Jabatan : **STAF AHLI BUPATI BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KERJASAMA**
3. NHK : **728190**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.890.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 34.000 m2/488 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI , Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/140 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 2.700 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 189.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. LAINNYA, YANMAR HAND TRAKTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. LAINNYA, YANMAR HAND TRAKTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 S A/T / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 504.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 164.606.810

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.747.606.810

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.747.606.810

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.